



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 30 Januari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : BUMN/BUMD
LEMBAGA : PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO)
UNIT KERJA : UIW Papua dan Papua Barat

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **BUDIONO**
2. Jabatan : **GM UIW P2B**
3. NHK : **207069**

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN****Rp. 1.875.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 295 m2/94 m2 di KAB / KOTA KOTA PALEMBANG , HASIL SENDIRI Rp. 225.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 500 m2/56 m2 di KAB / KOTA KOTA PALEMBANG , HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 180 m2/140 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA PUSAT , HASIL SENDIRI Rp. 1.150.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 105 m2/62 m2 di KAB / KOTA KOTA BANDAR LAMPUNG , HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN**Rp. 735.000.000**

1. MOBIL, MITSUBISHI MINIBUS / XPANDER Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 160.000.000
2. MOBIL, TOYOTA MINIBUS / VOXY Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000
3. MOBIL, TOYOTA AGYA Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 175.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA**Rp. 22.550.000****D. SURAT BERHARGA****Rp. ----****E. KAS DAN SETARA KAS****Rp. 770.419.464****F. HARTA LAINNYA****Rp. ----****Sub Total****Rp. 3.402.969.464****III. HUTANG****Rp. 1.000.000****IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)****Rp. 3.401.969.464**



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.